

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Asuransi Usaha Ternak Sapi Dan Kerbau Di Kelurahan Sangiasseri

Muhammad Amar
Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email: amarkputrapratama@gmail.com

Korespondensi penulis: amarkputrapratama@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the implementation and the inhibiting and supporting factors of the Implementation of Local Government Policies on Cattle Business Insurance in Sangiasseri Village. The research type is qualitative, the data collection techniques are observation, interview and documentation. Informants were the Head of the Livestock and Animal Health Service Office of Sinjai District, Head of the Non-Ruminant Livestock Cultivation and Breeding Section, South Sinjai Subdistrict Livestock Officer, South Sinjai Subdistrict Livestock Extension Officer, and Sangiasseri Village Livestock Group. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. Disposition is evidenced by realizing policies in the form of subsidies for Livestock Communities. And the bureaucratic factor of division of labor in policy implementation, especially the Production and Processing of Livestock products, which is divided into three sections, namely the Ruminant Livestock Cultivation and Breeding Section, the Non-Ruminant Livestock Cultivation and Breeding Section, the Livestock Product Processing Section and supported by the structured bureaucracy in the Livestock and Animal Health Service Office so that the duties and obligations to be carried out become directed and also facilitate the process of coordination, reporting and control.*

Keywords: *Policy Implementation, Insurance, and Livestock Business.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kelurahan Sangiasseri. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Kepala Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Petugas Peternakan Kecamatan Sinjai Selatan, Penyuluh Peternakan Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kelompok Ternak Kelurahan Sangiasseri. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Disposisi dibuktikan dengan merealisasikan kebijakan berupa bantuan subsidi untuk Masyarakat Ternak. Dan faktor birokrasi pembagian kerja dalam pelaksanaan kebijakan khususnya Bidang Produksi dan Pengelolaan hasil Peternakan yang terbagi menjadi tiga seksi yaitu seksi Budidaya dan Perbibitan ternak Ruminansia, Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, seksi Seksi Pengolahan hasil Peternakan serta di didukung dengan terstrukturnya birokrasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga tugas dan kewajiban yang akan dilaksanakan menjadi terarah juga mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan dan pengendalian.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Asuransi, dan Usaha Ternak

LATAR BELAKANG

Peternakan merupakan salah satu sub-sektor dalam sektor pertanian yang berkontribusi dalam penyediaan protein hewani yakni daging, susu, telur dan pupuk kandang. Peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat seperti daging yang memiliki nilai kandungan protein yang cukup tinggi. Daging dapat dihasilkan dari berbagai komoditas peternakan seperti ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang mampu berpikir berkreasi dalam berkarya, hanya akan dicapai bila masyarakat kita telah dipenuhinya kebutuhan protein (terutama protein hewani). Sehingga dengan demikian, baik seluruh masyarakat sebagai peternak, para investor dan terutama bagi pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dalam pembangunan, harus berbuat bersama untuk kesejahteraan bangsanya.

Usaha di bidang peternakan memiliki bermacam risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri, yang diantaranya diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam dan wabah penyakit. Dalam usaha peternakan, jika peternak tidak bisa mencegah atau menghadapi risiko yang ada maka usahanya bisa berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu pada tahun 2016, kementerian pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengeluarkan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Tujuannya untuk mengalihkan risiko kerugian dan atau kehilangan sapi kepada pihak ketiga yaitu melalui skema pertanggung jawaban asuransi dan sasarannya adalah terlindunginya peternak sapi dan kerugian usaha. Kementerian Pertanian memberikan bentuk kebijakan asuransi ini dengan cara pembayaran premi asuransi, para peternak hanya diwajibkan membayar 20% dari nilai premi yang ada dan 80% sisanya di dapat melalui subsidi pemerintah. Nilai premi asuransi yang seharusnya di bayar peternak adalah sebesar Rp. 200.000,- per ekor/tahun, tapi karena ada subsidi dari pemerintah sebesar 80% atau senilai Rp. 160.000,- maka peternak hanya di berikan beban biaya premi sebanyak Rp 40.000,- per ekor/tahun.

Pihak asuransi ternak sapi melalui JASINDO (Jasa Asuransi Indonesia) umumnya melakukan sosialisasi terhadap kelompok tani dan ternak sapi untuk

mempermudah dalam menjaring para peternak sapi untuk mengikuti atau bergabung dengan asuransi ternak sapi tersebut. Dengan di terapkannya asuransi usaha ternak sapi/kerbau ini para peternak akan mendapat jaminan berupa ganti rugi kematian sapi dan kehilangan serta pencurian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Asuransi Usaha Tenak Sapi, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para peternak yang mengembangkan komoditi sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan, mengalikan resiko kerugian usahabudidaya ternak sapi akibat kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungungan asuransi dan meningkatkan partisipasi peternak dalam program inseminasi buatan. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi pertanian khususnya subsektor peternakan di Kabupaten Sinjai yang perlu dapat di manfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pihak. Salah satu yang memanfaatkan AUTS adalah Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, populasi Perkembangan peternak yang telah mengasuransikan ternaknya di Kelurahan Sangiasseri.

KAJIAN TEORITIS

dalam perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Dalam kaitan ini seperti dikemukakan oleh Wahab (1990): 51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Dalam Sumaryadi dkk (2005:15) merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan yaitu Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/ swasta yang diarahkanpada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Ceema dan Rondinelli implementasi adalah dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan. Sedangkan Jones menyatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi persepsi/definisi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, evaluasi

dan penyesuaian/terminasi. Penekanan aktifitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktifitas.

Donald Van Meter dan Carl Van Horndalam Masriani (2017:06) membatasi implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan –kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali kearah perkembangan ekonomi lainnya. Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana insvestasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenemen terjadi. Padahal tujuan utama pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri dalam perjanjian adalah untuk mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga yang menimpah objek asuransi (Sunarmi, 2014).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015Peraturan ini menjelaskan dengan gamblang apa itu fasilitas asuransi pertanian, mulai dari definisi yang menjelaskan hubungan antara pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, yang semuanya itu termasuk kedalam asuransi pertanian, misalnya saja pada ketentuan pasal 1, bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yakni dijelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan . Ketentuan pasal tersebut memberikan definisi bahwa peternakan juga termasuk kedalam usaha tani, sehingga asuransi usaha ternak sapi termasuk juga kedalam asuransi pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40/Permentan/SR 02/Kpts/SR.220/B.01/2017, Pemerintah membuat kebijakan yang sangat menguntungkan bagi para peternak sapi melalui peraturan ini, karena pemerintah melalui Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan berupa subsidi premi bagi para peternak sapi yang ikut dalam

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Pembahasan mengenai subsidi premi program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dijelaskan dalam bab tersendiri .

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun Teknik Analisis data yaitu Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Atau dengan kata lain, peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan kemudian Reduksi Data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi. Selanjutnya Penyajian Data pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami dan yang terakhir adalah Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kelurahan Sangiasseri

Salah satu keunggulan kompetitif dari pengembangan komoditi peternakan jika dibandingkan dengan komoditi sektor pertanian lainnya adalah efisiensi penggunaan lahan yang baik, dan dapat dikembangkan bersama-sama dengan komoditi pertanian lainnya, sehingga petani yang mengembangkannya dapat melakukan diversifikasi usahatani. Komoditi peternakan juga menjanjikan potensi pasar yang sangat besar, baik pasar domestik maupun untuk kebutuhan ekspor. Produksi komoditi peternakan dalam negeri belum seimbang dengan pertumbuhan pasar yang sangat besar. Kebutuhan akan hasil komoditi peternakan di dalam negeri belum seimbang dengan produksi yang dihasilkan, hal ini menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor produk-produk peternakan dalam jumlah besar khususnya daging. Padahal daging merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat,

serta merupakan komoditi ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Untuk mencapai tujuan pembangunan peternakan tersebut diatas, maka Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, mengacu kepada visi dan misi.

Kebijakan merupakan tindakan atau arah yang harus dipedomani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan strategi demi tercapainya Renstra sesuai dengan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Relevansi dan konsistensi antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Relevansi Dan Konsistensi Antara Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Dan Sasaran Renstra DPKH

| RPJMD | | Renstra | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| Meningkatkan Kesejahteraan Peternak | Meningkatnya produktifitas Peternak | Meningkatnya produktifitas Kesejahteraan Peternak | 1. Meningkatkan Populasi Ternak 2. Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular 3. Meningkatkan Keamanan Bahan Asal Hewan |

Sumber Data: Renstra 2018-2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan sasaran dari Renstra pada tabel diatas maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten sinjai memang sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengingat pendapatan masyarakat di Kelurahan Sangiasseri sebagian besar bergantung pada hasil Pertanian khususnya di sektor Peternakan.

Pentingnya Menjalin Komunikasi

Faktor terpenting dalam melaksanakan suatu program kebijakan adalah komunikasi. Dimana komunikasi merupakan penunjang utama dalam melaksanakan kebijakan. Maka Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan juga melakukan hal yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Adapun data pendukung dalam hal ini, data mengenai daftar hadir sosialisasi Usaha Ternak

Sapi/Kerbau (AUTS/K) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai
 Sebagai berikut :

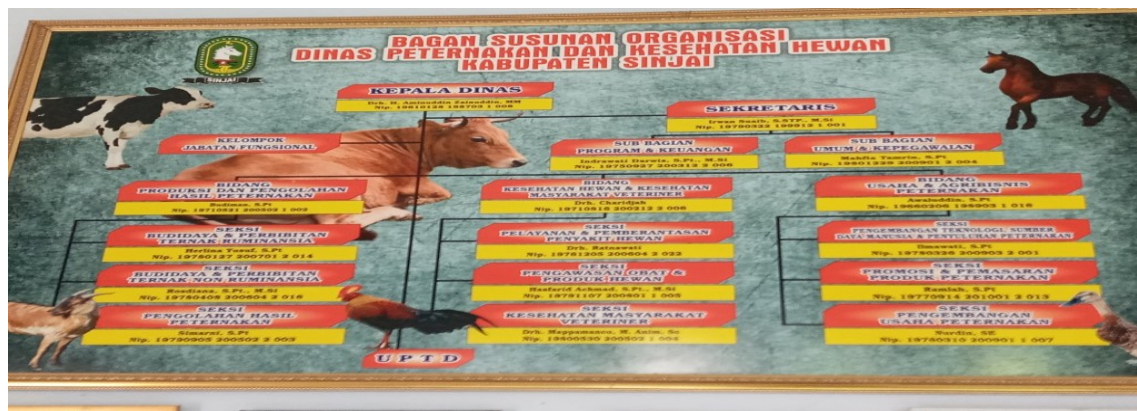
Tabel 4.2 Daftar hadir sosialisasi AUTS/K di Kelurahan Sangiasseri.

| DAFTAR HADIR | |
|--------------------|----------------|
| Nama Kelompok Tani | Jumlah Peserta |
| Kalibong | 13 Orang |
| Padang Loang | 11 Orang |
| Balang-Balang | 5 Orang |
| Babara | 30 Orang |
| Mattirowalie | 7 Orang |

Sumber Data : Penyuluh Pertanian Kecamatan Sinjai Selatan

Struktur Birokrasi

Kebijakan suatu oragnisasi/instansi khususnya di bidang pertanian dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membutuhkan kerjasama dan pembagian tugas.. Apabila struktur birokrasi yang ada tidak kondusif dengan kebijakan yang ada maka hal tesebut akan menyebabkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Kebijakan suatu organisasi Kemudian di dukung pula dengan strukrur birokrasi di Balai Penyuluhan Kecamatan Sinjai Selatan yang digambarkan Sebagai berikut:



Sumber Data: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai

Faktor Penghambat

Kesadaran dan partisipasi warga masih kurang, meskipun sudah dilakukan edukasi namun warga masih kurang tertarik mengikuti program kerja AUTS/K, selain itu faktor ekonomi juga berpengaruh dimana masyarakat Kelurahan Sangiasseri yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani khususnya di sektor Peternakan dengan aktivitas yang cukup padat sehingga kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan mengenai AUTS/K

Faktor Pendukung

Tersedianya bantuan gratis untuk peserta AUTS/K yang siap mengikuti IB Pada sapi betina, sehingga mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat ternak. selain itu Petugas Peternakan Kecamatan serta Penyuluh Peternakan Kecamatan Sinjai selatan tetap berusaha dalam menjalankan kebijakan program AUTS/K dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai

KESIMPULAN DAN SARAN

komunikasi dalam implementasi kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Petugas Peternakan Kecamatan Sinjai Selatan Serta Penyuluh Peternakan dengan kelompok ternak masih kurang efektif, dimana implementor masih kurang komunikasi secara massal. Hal tersebut dapat menghambat terlaksananya kebijakan AUTS/K dalam mengetahui apa saja yang diperlukan para peternak. Selain itu Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan dalam hal ternak serta sikap para implementor kebijakan cukup baik dan efektif karena dapat menyesuaikan keadaan dan situasi yang terjadi dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya. Disposisi dibuktikan dengan merealisasikan kebijakan berupa bantuan subsidi dari pemerintah daerah Untuk masyarakat ternak yang bersedia mengikuti IB pada ternaknya. Dan faktor birokrasi pembagian kerja dalam pelaksanaan kebijakan khususnya Bidang Produksi dan Pengelolaan hasil Peternakan yang terbagi menjadi tiga seksi yaitu seksi Budidaya dan Perbibitan ternak Ruminansia, Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, seksi Seksi Pengolahan hasil Peternakan serta di didukung dengan terstrukturnya birokrasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga tugas dan kewajiban yang akan dilaksanakan menjadi

terarah juga mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan dan pengendalian.

Disarankan Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Petugas Peternakan Kecamatan Sinjai Selatan agar dapat memberikan pemahaman terkait AUTS/K secara rutin kepada kelompok ternak dan masyarakat ternak serta pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan ternak melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau khususnya di Kelurahan Sangiasseri. Masyarakat perlu mengetahui lebih terperinci terkait Keuntungan dan jaminan dalam mengikuti program AUTS/K yang dapat menunjang kebutuhan hidup peternak khususnya di Kelurahan Sangiasseri.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Ilham Kubro, Nurlaili, Riyanto 2019. "*Sikap Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2019*". [Http://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/jppm](http://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/jppm). Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 01.40 Wita.
- Anam Syarful Dzikri 2018. "*Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau*". http://repository.unair.ac.id/74598/3/JURNAL_Fis.AN.56%2018%20Ana%20e.pdf . Diakses pada tanggal 15 Mei 2021 Pukul 22.10 Wita.
- Azim HabibbulEmil 2020. "*Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Tanah Datar*". <http://scholar.unand.ac.id/55704/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 01.10 Wita.
- Amaliya Firda 2018. "*Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani (AUT/P)*". http://Scholar.google.co.id/scholar?q=implementasi+kebijakan=AUTP&hl=id&as_sdt=0&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3DrNQtWxo6BoMJ. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 22.00 Wita.
- Congge, Umar. dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Edisi-4. Sinjai: UMSI Press
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai. 2018. *Rencana Strategis*. Sinjai: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai
- Guntara, D. 2016. *Asuransi dan Ketentuan – Ketentuan Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1 No 1. Karawang.
- Rahim Effendi Supli 2013. "*Analisis Kebijakan Publik*". <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan->

- publik-edward-iii.html?m=1. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 23.30 Wita.
- Ilyas. 2015. *“Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling”*. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/download/5316/4226>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 18.30 Wita.
- Imam Fatoni Prayoga¹, Yennie Agustin Mr, Siti Nurhasanah 2018. *Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi*”. <Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/13022/1/1426-4697-1-Pb.Pdf>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 01.00 Wita.
- Nurliani 2019. *Penerapan Strategi Promosi Pemasaran Asuransi Ternak Sapi Pada Pt.Asuransi Jasindo Kota Jambi*. http://repository.uinjambi.ac.id/1797/1/SES141444_NURLIANI_EKONOMI%20SYARIAHAKUNTANSI%20-%20Nur%20Lian.pdf. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 22.30 Wita.
- Moleong. 2013. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Edisi Revisi. Bandung.: Pt Remaja Rosda Karya.
- Masriani, 2017. *“Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Anak Di Kecamatan Mandau)”*. <http://media.neliti.com/media/publications/185377-ID-implementasi-kebijakan-tentang-perlindun.pdf>. 28 Juni 2021 Pukul 19.00 Wita.
- Satrio Olga. 2018. *“Efektifitas Asuransi Usaha Ternak Sapi Di Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langka”*. <Http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/892/1/Skripsi%20lengkap.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 23.00 Wita.
- Sunarmi. 2014. *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1. Medan.
- Kadek Ayu Charisma Julia Dewi, S.P, M.P 2018. *“Peranan Asuransi Ternak Sapi Pada Kelompok Pelaksana Simantri Di Kabupaten Buleleng”*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?Article=1757502&val=18586&title=PERANAN%20ASURANSI%20TERNAK%20SAPI%20PADA%20KELOMPOK%20PELAKSANA%20SIMANTRI%20DI%20KABUPATEN%20BULELENG>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 01.20 Wita.

- Khasana Uswatun. 2019. *“Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5523/1/Skripsi%20Uswatun%20Kasanah%20210214185.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 01.50 Wita.
- Nina Sari An-nisa, Rizal Syariefdan Gendut Suprayitno (2015). *Strategi pengembangan asuransi ternak sapi*. https://www.researchgate.net/publication/290136120_Strategi_Pengembangan_Asuransi_Ternak_Sapi. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 02.00 Wita.
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi
- Wijayanti Emi Aninda 2019. *“Pelaksanaan asuransi bagi usaha tani dan ternak sapi berbasis kesejahteraan petani dan peternak”* http://lib.unnes.ac.id/35993/1/8111412100_Optimized.pdf. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 22.45.
- Wahab, Solichin, A. 1990. *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi je Implementasi Kebijakan Negara*. Malang : Bumi Aksara.
- Sumaryadi, 1 Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Yuanitaardha. 2015. *“Kumpulan Teori Efektivitas”*. <http://yuanitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 20.36 Wita.
- Shinta Noviana Mattata. 2015. *“Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Dikabupaten Luwu Timur”*. <https://core.ac.uk/download/pdf/77622163.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 02.30 Wita.